

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BARTER DAGING
SAPI DENGAN PADI PEMBAYARAN TEMPO
(Studi Kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten
Pringsewu)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Tugas Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Money sugesti
NPM 1621030036**

Program Studi Muamalah

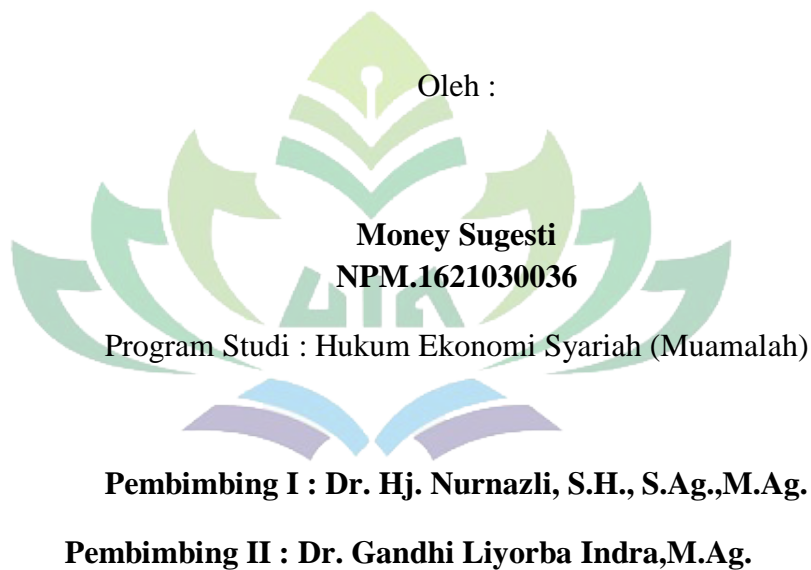


**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BARTER
DAGING SAPI DENGAN PADI PEMBAYARAN TEMPO
(Studi Kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Barter atau pertukaran merupakan sebuah kegiatan dagang yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Pertukaran sebenarnya sudah jarang digunakan, namun terjadi di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Transaksi yang dilakukan tersebut ialah penjual daging mengizinkan pembelian daging dengan pembayaran tempo namun dengan barang yang memiliki nominal lebih besar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik *barter* daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik *barter* tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *barter* daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik *barter* daging sapi dengan padi tersebut.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserch*), yang bersifat deskriptif *kualitatif* dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak yang melakukan *barter* dan data sekunder dari buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang berhubungan dengan praktik *barter*. Setelah data terkumpul maka melakukan analisa dengan melakukan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode cara berfikir *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *barter* daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu bahwa pihak petani ingin membeli daging dengan pembayaran tempo. Namun pihak penjual memberikan syarat hanya boleh membeli sebesar 2 kg tulang dan 2.5 kg daging sapi. Harga daging 1 kg Rp. 120.000,- dan tulang 1 kg Rp. 50.000 dengan total harga menjadi Rp 400.000,- dan pembeli harus membayar menggunakan padi hasil panen sebesar 1 kwintal dengan pembayaran tempo 4 bulan yaitu pada saat panen padi tiba sedangkan harga padi ketika panen raya sebesar Rp 500.000/kwintal. Sehingga jumlah keseluruhan lebih besar dari jumlah harga asli daging. Tinjauan hukum Islam pada praktik *barter* daging sapi dengan padi pembayaran tempo tersebut tidak sesuai dengan syarat sah pertukaran dalam Islam. Meskipun pihak penjual daging memberikan kemudahan dalam transaksi pertukaran tersebut akan tetapi penambahan harga pada transaksi *barter* dengan objek yang dipertukarkan berbeda jenis dan jauh lebih besar dari harga tunainya karena perbedaan waktu dalam penyerahan barang termasuk dalam unsur *riba an-nasiah*. Dalam hal ini membuat transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pembeli.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Money Sugesti

NPM : 1621030036

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020

Money Sugesti

NPM. 1621030036



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

A Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tlpn. (0721) 703260 Kode pos 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan

Nama : Money Sugesti

NPM : 1621030036

Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran
Tempo (Studi Kasus Di Desa Wargomulyo
Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197111061998032005 NIP. 197308162003122003

Ketua Jurusan

Khoirudin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Tlpon. (0721) 703260 Kode pos 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo (Studi Kasus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu)”, disusun oleh : Money Sugesti dengan NPM. 1621030036 Jurusan Muamalah. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis/18 Februari 2021.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Khoirudin, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Dekan,

**Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NPM 16210221993031002**



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

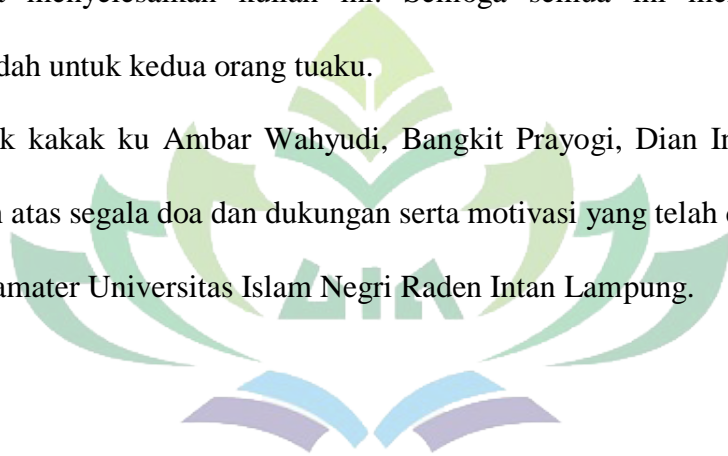
(Q.S. An-Nisa(4): 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang sangat dalam, saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Kamalludin dan Ibunda Nurbaysah yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh cinta, kasih dan sayang serta kesabaran yang tak terhingga. Yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberi semangat serta dukungan untukku. Berkat do'a restunya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tuaku.
2. Untuk kakak ku Ambar Wahyudi, Bangkit Prayogi, Dian Indra Sari terima kasih atas segala doa dan dukungan serta motivasi yang telah diberikan.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Money Sugesti, dilahirkan di pringsewu pada tanggal 01 juni 1998. Anak ke empat dari empat bersaudara yang terlahir dari pasangan Bapak Kamalludin dan Ibu Nurbaysah. Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK ABBA 2004.
2. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 WARGOMULYO yang diselesaikan pada tahun 2010.
3. Dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3 PARDASUKA) selesai pada tahun 2013.
4. Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 AMBARAWA), Jurusan IPS, selesai pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2016 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo (Studi Khusus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu). Dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Sarjana (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah. Atas dukungan dan bantuan semua pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah mengembangkan UIN Raden Intan Lampung seperti sekarang ini..
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, MH, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr.H.A.Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah
6. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan hingga skripsi ini dapat diselisaikan.
7. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Untuk Rumpi NS, Fadhila Azzahra, Nirmala Sari, Bunga Kurnia Uli Sinaga, Ulfa Dwi Haryanti Mega Yuza Sinanda terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu memberi dukungan selama awal masuk perkuliahan sampai saat ini dan yang selalu mendukung membantu dan memberi semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman- teman seperjuanganku seluruh mahasiswa dan mahasiswi Muamalah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016 khususnya Muamalah kelas A.
11. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

Bandar Lampung, 17 Desember 2020
Penulis

Money Sugesti
NPM. 1621030036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus penelitian.....	6
E. Rumusan masalah	6
F. Tujuan penelitian	6
G. Signifikasi penelitian.....	7
H. Metode penelitian.....	7

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	12
1. Akad.....	12
a. Pengertian akad.....	12
b. Dasar hukum akad.....	14
c. Rukun dan syarat akad.....	14
d. Macam-macam akad.....	17
e. Asas berakad dalam Islam	21
f. Berakhirnya akad.....	27
2. Barter dalam hukum Islam	28
a. Pengertian <i>barter</i>	28
b. Dasar hukum <i>barter</i>	31
c. Rukun dan syarat <i>barter</i>	34
d. Objek <i>barter</i>	40
e. <i>Barter</i> yang dibolehkan dan dilarang	42
f. Permasalahan dalam sistem <i>barter</i>	46
3. Riba	47
a. Pengertian riba.....	47
b. Dasar hukum riba.....	49
c. Macam-macam riba.....	52
d. Riba dalam pertukaran.	56
e. Hikmah dilarang nya riba.....	57

B. TINJAUAN PUSTAKA.....	58
--------------------------	----

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.....	61
1. Sejarah singkat Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu	61
2. Kondisi Geografis.....	62
3. Keadaan Sosial.	63
4. Keadaan Ekonomi Penduduk.....	65
5. Kondisi Pemerintahan pekon.....	67
B. Praktik <i>Barter</i> Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.	69

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Praktik pertukaran barang pembayaran tempo di desa wargomulyo kecamatan Pardasuka kabupaten pringsewu .. .	80
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek pertukaran barang pembayaran tempo di desa wargomulyo kecamatan Pardasuka kabupaten pringsewu	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta memahami isi dari makna proposal ini diperlukan adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah pada judul proposal ini untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini yaitu : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Barter Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo” Studi Khusus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu**, Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu :

1. Barter adalah kegiatan tukar- menukar barang yang terjadi tanpa perantaraan uang. Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi seperti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan

itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sampai sekarang barter masih dipergunakan pada saat terjadi krisis ekonomi di mana nilai mata uang mengalami devaluasi akibat hiperinflasi.¹

2. Daging adalah bagian tubuh binatang sebelian yang dijadikan makanan.²
3. Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras, termasuk jenis *Oryza* (ada banyak macam dan namanya) butir dan buah padi.³
4. Pembayaran tempo adalah diberikan waktu atau jangka waktu untuk membayar.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul tersebut adalah tinjauan fiqh muamalah (hukum islam) tentang praktik pembayaran yang ditangguhkan pada akad barter daging sapi dengan padi yang terjadi di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul “praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo ” yaitu:

1. Secara Objektif, Praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wargomulyo Kecamatan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Barter>

² Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.230.

³ Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.809.

⁴ <https://kamus.tokopedia.com/j/jatuh-tempo/>

Pardasuka Kabupaten Pringsewu. penulis dianggap perlu dan tertarik guna untuk menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Islam.

2. Secara Subjektif, Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas syari'ah, dan penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

C. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Allah Swt Mensyariatkan barter sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan jalan melakukan jual beli.⁵

Tukar menukar dipersamakan dengan jual beli, secara terminology fiqh jual beli disebut dengan al- ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Syekh Abdurrahman as-

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h.64.

Sa'di, sebagaimana dikutip oleh Mardani jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ
بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مَثَلًا يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ
سَوَاءٌ

“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan *(cash)*. Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”. (H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah).

Praktik pertukaran barang dengan barang yang terjadi di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten pringsewu yaitu pertukaran (*barter*) antara daging dengan padi pembayaran tempo. pihak pembeli membeli daging ke pihak penjual daging dengan sudah ditentukan berapa kg yang harus dibeli,yang terjadi disini yang harus dibeli 2kg tulang dan 2.5kg daging sapi dengan pembayaran tempo (*Empat bulan*) setelah panen padi, harga daging 1kg Rp. 120.000 tulang 1kg Rp. 50.000 jadi total semua harga daging Rp 400.000 pembeli harus membayar menggunakan padi hasil panen sebesar 1 kwintal padi sedangkan harga padi ketika panen raya di Desa

Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten pringsewu. 1 kwintal padi Rp 500.000, ada kelebihan nilai dalam praktik pertukaran barang dengan barang tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik pertukaran barang dengan barang pembayaran tempo, dengan judul “praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo“ Studi Khusus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu”.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo” untuk itu penulis akan memperjelas judul penelitian ini secara rinci seperti melakukan wawancara terhadap beberapa sampel yang melakukan barter daging dengan padi.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui hukum islam tentang praktik barter daging sapi dengan padi pembayaran tempo di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

G. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktek yang akan ditinjau dari segi hukum Islam, dan diharapkan dapat memperkaya ilmu tentang keislaman. Selain itu juga diharapkan penelitian ini juga diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶

1. Jenis Penelitian

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2011), Cet. 13, h.2.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Selain penelitian lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan kepustakaan (literatur), baik berupa buku, catatan, artikel, maupun laporan hasil dari penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.⁷ Didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik pertukaran barang dengan barang pembayaran tempo ditinjau dari hukum islam terhadap praktiknya.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti⁸. Sumber data utama terdiri dari orang yang menjual daging dan membeli daging di Desa Wargomulyo Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

⁸ Muhammad Pabundu Tika, *Metedologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h.57.

menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.⁹ Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan , yaitu dengan menelusuri buku-buku, kitab-kitab atau karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi yang berkaitan dengan topic yang dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek atau subjek yang akan menjadi target atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli daging sapi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹¹ Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjual daging sapi dua orang dan delapan orang pembeli.

5. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

⁹ Sugiyono, *Penelitian Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.218.

¹⁰ Cholis Narbuko Dan Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.71.

¹¹ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Bandung Alfabeta,2012)h.120.

gejala-gejala yang diselidiki.¹² Observasi yang dengan mengamati penjualan barter daging dengan padi pembayaran tempo.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog pewawancara dengan responden.¹³ Dalam hal ini peneliti mewawancarai penjual dan pembeli yang berkaitan dengan jual beli daging dengan pembayaran tempo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental seseorang¹⁴.

6. Metode pengolahan data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Adalah pengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relavan dengan masalah yang dikaji. Tujuan dari pada editing ini adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹⁵

b. Penyusunan Sistematika Data (*sistemazing*)

¹² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),h.70.

¹³ Suharsimi Arikuto,*Prosedur Penelitian Ilmiah* : suatu pendekatan praktik (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 126.

¹⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), h.38.

¹⁵ Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-13, (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), h.153

Adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶ Berdasarkan sub pokok bahasa-bahasa yang devinisikan dari rumusan masalah.

7. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran yang ditanggihkan pada akad barter daging dengan padi yang kemudian dikaji dengan menggunakan metode kualitatif maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktek dalam jual beli daging dengan sistem barter dengan padi pembayaran tempo yang dilihat dari sudut pandang Islam.

Metode yang digunakan yaitu metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktek jual beli daging dengan sistem barter dengan padi pembayaran tempo dan hasil analisa dituangkan dalam bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁶ Amarullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h.107

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Islam

a. Pengertian Akad (الْعَقْدُ)

Menurut bahasa “akad” (العقد) jamaknya *al-‘uqud* (العُقُود) mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan (الشدُّ), mengikat (الربط). Kebalikannya adalah berarti melepaskan (الحلُّ). Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengkokohkan (التوثيقُ), menguatkan (اليؤكدُ), menjamin (الضَّمانُ), dan berjanji (العَهْدُ).¹⁷

Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri:

- 1) Menurut *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum padan objek akad.

¹⁷Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1-2.

- 2) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁸

Adapun makna akad secara syar'i yaitu "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.¹⁹

Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.²⁰

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa **akad** itu sendiri adalah suatu ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad.

¹⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

²⁰*Ibid.*,

b. Dasar Hukum Akad

Firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ ءَلَّا نَعْمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah (5): 1).

Firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.” (Q.S Al-Isra’(17): 34)

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*),
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*),
- c) Objek akad (*mahallul- 'aqd*),
- d) Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*).

2) Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad atau perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:²¹

- a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in'iqad*) antara lain: *tamyiz*, berbilang pihak (*at-ta'adud*), persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan) kesatuan majelis akad objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki atau *mutaqawwin* dan *mamluk*), tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.²²

b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Syarat-syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- (1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.

²¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*...., h. 97-104.

²²Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*...., h. 95-98.

(2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

(1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sering digadaikan atau disewakan.

(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

d) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

d. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a) *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
 - (1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - (2) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz*.²³
 - b) *Akad yang tidak sah*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini menjadi dua macam yaitu:

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

- (1) Akad yang *batil*, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.
- (2) Akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.²⁴

2) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi:

a) Akad *Musamanah*

Akad *Musamanah* yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

b) Akad *Ghairu Musamanah*

Ghairu Musamanah yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti, *Aqad istishna' bai 'al-wafa'*.²⁵

²⁴*Ibid.*,

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59.

3) Berdasarkan Motifnya

Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi:

a) Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

b) Akad *Tabarru'* (*gratutions contract*)

Akad *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirbala). Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti *qard*, *wad'ah*, *rahn*, *kafalah*, dan lain sebagainya.²⁶

4) Berdasarkan Sifat Benda

Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi:

a) Akad '*ainiyah*

Akad '*ainiyah* yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *ariyah*, *rahn* dan lain sebagainya.

²⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60-61.

b) Akad *Ghairu 'ainiyah*

Akad *ghairu 'ainiyah* yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya *sighat* akad. Menimbulkan akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *ainiyah*, seperti akad amanah.²⁷

5) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad

Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi:

a) Akad *al-zamani* (akad bertempo)

Akad *al-zamani* yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini yaitu seperti akad upah-mengupah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam-meninjam. Akad tersebut memerlukan sebuah perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

b) Akad *al-fairui* (akad tidak bertempo)

Akad *al-fairui* yaitu akad dimana unsur tidak merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.²⁸

²⁷*Ibid.*, h. 62.

²⁸*Ibid.*, h. 91-92.

e. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya.²⁹ Dimana asas berakad dalam Islam antara lain:

1) Asas Ilahiah

Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.³⁰

2) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan

²⁹*Ibid.*,

³⁰Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005), h. 238.

lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-Maidah (5): 1; Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa' (4): 33 dan 72.³¹

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265)

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Seperti Firman Allah SWT berikut ini:

³¹*Ibid.,*

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki”(Q.S An-Nahl (16): 71)

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama yaitu untuk menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

4) Asas Keadilan (Al-‘Adalah)

Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”(Q.S Al-Hadid (57): 25)

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur’an, bersikap adil sering kali Allah SWT

tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah (5): 8)

Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat.

Oleh karena itu. Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman. Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.³²

5) Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau

³²Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, Diterjemahkan Oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, Dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, (Rabbani Press, 1997), h. 396.

kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*). Berikut isi dari Firman Allah tentang asas kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’(4): 29)

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan haendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidakkah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak.

6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiqi*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidak

jujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S Al-Ahzab (33): 70)

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan ddan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

7) Asas Tertulis (*Al- Kitabah*)

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan , saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.³³

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: sukarela (*ikhtiyari*), amanah, kehati-hatian (*ikhtiyati*), tetap atau tidak berubah (*luzum*), saling

³³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia....*, h. 98.

menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, *taisir*/kemudahan, ikhtikad baik, sebab yang halal.³⁴

f. Berakhirnya Akad

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

1) Sebab *ikhtiyariyah*

Sebab *ikhtiyariyah* tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*).

2) Sebab *Daruriyah*

Sebab *daruriyah* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad *'ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah* atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.
- b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena

³⁴*Ibid.*, h. 98-99.

adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.

- c) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.³⁵

2. Barter Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Barter

Barter adalah salah satu sistem dari transaksi jual beli dimana sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam pertukarannya dua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama.³⁶ *Barter* juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya.³⁷

Secara bahasa kata *barter* dapat diartikan dengan pertukaran. Tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain (*wadha'a al-syai'fi muqabalatil akhar liya'taadhu hadza bima ladai dzaka*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertukaran adalah perbuatan bertukar atau memepertukarkan yang satu dengan yang lain. Secara istilah *al-*

³⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*...., h. 26-28.

³⁶ Wiyono Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 48.

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61.

mu'awadhat adalah segala aktifitas pertukaran harta atau *asset* baik dalam *real asset* maupun *nonreal asset*.³⁸

Pertukaran masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern sistem pertukaran sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya, melainkan terikat ke dalam suatu jenis pekerjaan atau jasa, dan untuk kebutuhannya yang lain tergantung pada yang lainnya.

Oleh karena itu seseorang harus menjadi ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan melalui pertukaran dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas itu. Jika sekiranya setiap orang memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya sendiri, maka tidak ada lagi bentuk tukar menukar, akan tetapi dalam era modern dewasa ini keinginan telah berkembang sedemikian rupa sehingga praktis tidak mungkin bagi setiap orang memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya sendiri.³⁹ Lebih spesifiknya lagi yang dimaksud pertukaran dalam penelitian ini ialah pertukaran barang dengan barang (*barter*).

Menurut pasal 1541 KUHPdt, tukar-menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai ganti ruginya suatu

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 73.

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.72.

barang lain.⁴⁰ *Barter* adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis. Beberapa kalangan berpendapat bahwa *barter* sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan.

Menurut Sunarto Zulkifli berpendapat bahwa yang perlu diatur adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses *barter* harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang diperlukan.⁴¹

Selain itu, ia juga memandang bahwa jika permasalahannya adalah pada informasi harga, maka proses jual beli (barang dengan uang) pun bisa menjadi permasalahan akibat salah satu pihak kekurangan informasi harga.⁴² Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Sunarto Zulkifli menganggap bahwa transaksi *barter* dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.⁴³

⁴⁰ Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet. Ke.41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 380.

⁴¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 47.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

b. Dasar Hukum *Barter*

Dasar hukum dari pertukaran terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu sumber hukum yang pertama yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam, sehingga hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus ditaati. Allah SWT berfirman QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 1)

Dan QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

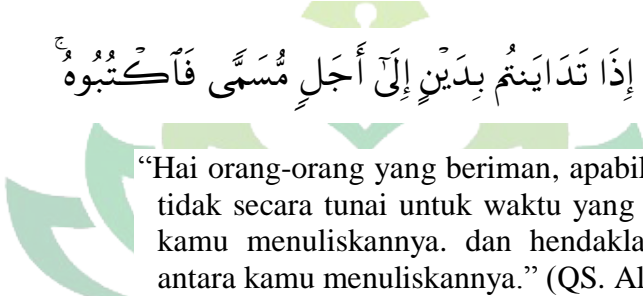
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' (4): 29)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim melakukan traksaksi-transaksi atau perniagaan dengan cara batil, kecuali suka sama suka di antara kamu. Maksud dari batil di sini sangat luas, ialah melakukan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan transaksi mengandung adanya riba atau pun transaksi yang mengandung *ghararnya* (ketidakjelasan). Dalam masalah jaminan, Allah SWT berfirman:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Maksud dari ayat tersebut di atas ialah apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah meraka menulisnya, agar sebagai bukti bahwa pernah melakukan transaksi.

2) Al-Hadis

Al-Hadis yaitu sumber hukum yang kedua, menurut ushul fiqh ialah perkataan dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah ia menjadi seorang Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرٍّ نَبِيٌّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَ نَأْتَمِرْزِيِّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ شَمَّ اشْتَرِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمٌ)⁴⁴

“Dari Abu Sa’id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Bilal datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil menyerahkan kurma Barney”. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, Dari nama engkau mendapatkan kurma ini? Bilal menjawab, “Tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua sha “dengan satu sha” (yang bagus), agar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Awwah awwah. Ini adalah riba yang sebenarnya, janganlah engkau melakukannya, tapi jika engkau ingin membeli, juallah kurma (yang rendah mutunya) dengan penjualan lain, kemudian belilah dengannya (kurma yang bagus mutunya)”. (HR. Bukhari-Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالزَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا يَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁵

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (*cash*). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi samasama salah”. (HR. Muslim)

⁴⁴Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taysiru al allam Syarh Umdatul Ahkam Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi Cet VII, (Deriut: Darul Falah, 2008), h. 648.

⁴⁵Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* Cet. Ke-4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.136

Jika kita telaah, hadis di atas menjelaskan tentang dua kelompok barang, kelompok pertama adalah mata uang atau uang, kelompok kedua adalah makanan. Kemudian para ulama berbeda-beda dalam menentukan *ilat* kedua jenis barang tersebut. Dalam penjelasan para ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu sebagai berikut:

- a) '*ilat* jenis mata uang adalah *tsamaniyah* (keberadaanya sebagai mata uang), karena emas dan perak yang dicontohkan dalam hadis di atas adalah mata uang yang berlaku ketika itu (yang berupa emas dan perak).⁴⁶
- b) '*ilat* jenis makanan adalah *th'm*, maksudnya setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok (roti, beras).⁴⁷

c. Rukun Dan Syarat *Barter*

1) Rukun Dalam Pertukaran atau *Barter*

Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*), maka rukun dari pertukaran tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Penjual (*bai'*)
- b) Pembeli (*Musytari'*)
- c) Barang yang dipertukarkan
- d) Ijab qabul (*sighat*).⁴⁸

⁴⁶Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30.

⁴⁷ *Ibid.*,

2) Syarat Dalam Pertukaran atau *Barter*

Pertukaran atau *barter* merupakan termasuk dalam jual beli, sebagaimana pengertian jual beli menurut istilah (*terminologi*) jual beli adalah:

⁴⁹ مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).”

Maka dapat disimpulkan bahwa syarat pertukaran dengan jual beli adalah sama. Berikut adalah syarat-syarat dalam pertukaran:

a) Subjek jual beli (pertukaran), yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁵⁰

(1) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli (pertukaran) yang dilakukan tidak sah.

(2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan

⁴⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 48.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) h.68

⁵⁰ Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.105-110

transaksi pertukaran tersebut bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu pertukaran yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁵¹

(3) Keduanya tidak *mubazir*

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi pertukaran bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

(4) *Baligh*



Baligh yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi pertukaran yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual

⁵¹ *Ibid.,*

beli (pertukaran), khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁵²

- b) Objek pertukaran, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli (pertukaran), dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵³

(1) Suci atau bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang dipertukarkan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh dijual belikan (dipertukarkan) sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah bahwa diperbolehkan seseorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek pertukaran asalkan pemanfaatan

⁵²Khumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*,, h.105-110

⁵³ *Ibid.*,

barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

(2) Barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, karena pada dasarnya semua barang yang dapat dijadikan sebagai objek pertukaran adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi.⁵⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang dipertukarkan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariah Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

(3) Barang yang dipertukarkan milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian pertukaran atas sesuatu barang adalah pemilik sah atau asli barang tersebut. Dengan demikian pertukaran yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian pertukaran yang batal.

(4) Barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan

Maksud bahwa barang atau benda yang dipertukarkan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang

⁵⁴ *Ibid.*,

dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.⁵⁵

(5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui

Artinya bahwa barang atau benda yang akan dipertukarkan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah pertukaran yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau pertukaran yang mengandung penipuan.

c) Ijab Kabul Pertukaran

Ijab kabul pertukaran yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagaimana gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi pertukaran. Dalam ijab kabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- (1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya, begitu juga sebaliknya.
- (2) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- (3) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

⁵⁵ *Ibid.*,

(4) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain atau *spekulasi* lain.

(5) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

d. Objek Pertukaran

Objek akad adalah sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Dalam fiqh, objek akad ini sering disebut dengan istilah *mal* (harta). Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan dalam menentukan cakupan pengertian harta. Sebagian ulama memberikan pengertian harta hanya pada objek yang tampak secara jelas dan dapat disimpan. Sebagian lainnya mengatakan cakupan harta tidak semata objek yang tampak dan bisa disimpan, tetapi juga termasuk manfaat suatu benda.⁵⁶

Dari segi objek pertukaran ada tiga jenis pertukaran, yaitu sebagai berikut:

1) Pertukaran *Real Asset* (*Ayn*) dengan *Real Asset* (*Ayn*).

Dalam pertukaran ini, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah (diperbolehkan). Namun bila jenisnya yaitu sama, fiqh telah membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan

⁵⁶Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*..., h. 74.

mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat untuk dibedakan mutunya.

Contoh Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan yaitu karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya, maksudnya ialah karena kuda jelas mutunya atau kualitasnya bisa dilihat berapa ekor kuda yang ingin dipertukarkan. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.⁵⁷ Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang lain maka pertukaran ini disebut dengan *barter*.

2) Pertukaran *Real Asset (Ayn)* dengan *Financial Asset (Dayn)*

Dalam pertukaran *ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis *ayn*-nya. Bila *ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran *ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai*). Sedangkan bila *ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut dengan sewa-menyewa atau upah mengupah (*al-ijarah*).⁵⁸

3) Pertukaran *Financial Asset (Dayn)* dengan *Financial Asset (Dayn)*.

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (untuk selanjutnya disebut surat berharga). Perbedaan uang dengan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib menerima uang

⁵⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Cet. Ke 10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 53.

⁵⁸*Ibid.*, h. 54.

sebagai alat bayar. Sedangkan aseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: *sawa-an bi sawa-in* (sama dalam jumlahnya) dan *yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya). Misalnya pertukaran satu lembar uang pecahan Rp.100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp. 10.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama. Pertukaran uang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat: sama waktu penyerahannya. Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharf* (*money changer*). Misalnya pertukaran USD 1000 dengan Rp. 10.000.000.⁵⁹

e. **Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang**

1) **Pertukaran yang Diperbolehkan**

Al-Qur'an melarang semua tindakan atau perbuatan memperoleh harta dengan cara tidak halal. Pengakuan Al-Qur'an atas harta benda yang dimiliki seseorang merupakan pengakuan dan penegasan atas haknya yang *eksklusif* untuk mengambil keputusan yang penting berhubungan dengan harta yang dimilikinya. Pemilik harta bias menggunakan, menjual, dan menukar pada kekayaan yang dimilikinya

⁵⁹ *Ibid.*, h. 56.

dan karenanya Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal.⁶⁰

Mengenai pertukaran ini, Al-Qur'an bukan saja mengizinkan bahkan mendorong untuk menjalankannya dengan penuh semangat dan optimism. Legalitas tersebut member implikasi bahwa seseorang bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama berada dalam batasan yang diizinkan syara'. Di samping itu, untuk mengembangkan usaha yang dilakukan, maka dianjurkan untuk melakukan kerjasama atau bermitra dengan pihak-pihak lain dengan saling member manfaat dan memberi keuntungan.⁶¹

2) Pertukaran yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang yaitu sebagai berikut:

a) Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha menurut ajaran Islam adalah riba. Walaupun istilah riba memiliki beberapa makna, namun dapat diambil suatu pengertian umum, yaitu meningkatkan baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.⁶²

b) *Gharar* atau *Taghrar*

⁶⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah....*, h.80

⁶¹ *Ibid.*, h. 80-81.

⁶² *Ibid.*

Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur *gharar* adalah benda yang menjadi objek akad itu tidak ada di tangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan, sehingga mengakibatkan pembeli mengalami sebuah kerugian, penyesalan, dan bahaya. Sedangkan bagi pelakunya sendiri dianggap memakan harta secara batil. *Gharar* ini bias berbentuk barang dan bisa pula dalam bentuk *shighat* atau akadnya.⁶³

c) *Tadlis*

Merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan atau yang dipertukarkan. *Tadlis* bisa dari penjual atau pembeli. *Tadlis* dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. *Tadlis* dari pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah.⁶⁴

d) *Ghabn* (penipuan pada harga barang)

Al-ghabn menurut bahasa berarti *al-khada'* (penipuan). *Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata. *Ghabn fahisy* merupakan penipuan yang dilakukan secara keji, *Ghabn* ini termasuk *tadlis* dalam harga.⁶⁵

e) *Maysir* (perjudian)

⁶³ *Ibid.*, h. 85.

⁶⁴ *Ibid.*, h.86.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 87.

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Suatu kegiatan atau perbuatan dianggap *maysir* (perjudian) ketika terjadinya *zero same game*, yaitu keadaan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya.⁶⁶

f. Permasalahan dalam Sistem *Barter*

Berikut permasalahan-permasalahan dalam penerapan sebuah sistem pertukaran (*barter*), diantaranya sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Perekonomian pertukaran (*barter*) memerlukan dua kepentingan yang sama atau kehendak ganda yang selaras (*double coincidence of wants*).
- 2) Penentuan harga sukar dilakukan. Maksudnya nilai pertukaran sesuatu barang dengan barang lain harus dibuat lebih dahulu dan inilah rumitnya sistem pertukaran (*barter*). Misalnya nilai 2 kg beras sama dengan 1 kg minyak goreng.
- 3) Perekonomian pertukaran (*barter*) membatasi pilihan pembeli. Seorang pembeli terkait dengan syarat yang ditentukan pihak lain yang menginginkan barang yang dimilikinya. Contohnya A ingin menukar 50kg beras miliknya, tapi B punya seekor kambing untuk ditukar beras 200kg beras. Ada dua pilihan bagi A, memenuhi permintaan B atau membatalkannya.

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Mikro* Cet. Ke-2, (Depok: Kencana, 2017), h. 216.

- 4) Menyulitkan pembayaran tertunda. Penjualan secara kredit dibayar dalam bentuk barang juga dan ini akan menyulitkan, baik jenis dan mutu barang yang digunakan sebagai pembayaran.
- 5) Sukar menyimpan kekayaan. Menyimpan kekayaan dalam bentuk barang memerlukan tempat dan biaya yang besar.

3. Riba

a. Pengertian Riba

1) Pengertian Riba

Riba secara bahasa yaitu bermakna tambahan. Dalam pengertian linguistic bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau tambahan modal secara batil.⁶⁸ Maksud dari “tambahan” disini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga hutang dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang tersebut berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dollar, harus serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.⁶⁹

⁶⁸Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 238.

⁶⁹Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015, h. 649.

Dari beberapa definisi riba yang ada terdapat sebuah ketegasan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli (pertukaran) maupun pinjam-meminjam secara batil. *Bathil* di sini adalah bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁷⁰ Secara hukum fiqh (*juristikal*) riba mengandung pengertian:

- a) Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dimana pertukaran uang tersebut dalam bentuk uang yang sama (*dollar-for-dollar exchange*, misalnya).
- b) Tambahan nilai uang pada satu sisi yang sedang melakukan kontrak tatkala komoditas yang didagangkan secara *barter* itu pada jenis yang serupa. Beberapa fukaha mempergunakan istilah ini dalam istilah yang umum dengan memasukkan semua bentuk transaksi yang tidak halal.⁷¹

Menurut A. Hassan, riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam-meminjam. Syabirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang dipinjamkan.⁷² Menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan, yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis yang riil. Menurut Qatadah, Riba *jahiliyyah* adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang

⁷⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis....*, h. 239.

⁷¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 127.

⁷² Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) h.181

saat pembayaran dan pembeli tidak mampu untuk membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.⁷³

b. Dasar Hukum Riba

1) Al-Qur'an

Riba adalah salah satu kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT, begitu banyak firman-firman yang terkandung dalam AlQur'an yang menjelaskan bahwa riba itu diharamkan. Berikut adalah firman-firman Allah tentang riba, diantaranya sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 275)

⁷³ Ibid.,

Dan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Imran (3) : 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah (2) : 278)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 279)

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an di atas disebutkan bahwa Allah SWT melarang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, apabila dari mereka telah melakukannya, maka diantara mereka harus

meninggalkannya agar mereka tidak tersesat atau pun terjerumus dalam api neraka.

2) Hadis

Sebagaimana yang telah diketahui al-Hadis merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, selain itu untuk mengatur hukum-hukum atau aturan-aturan khususnya dibidang hukum Islam, salah satunya yaitu bahwa umat Islam tidak boleh memakan harta yang berasal dari riba, sebagaimana hadits yang tertera di bawah ini:

Rasulullah bersabda: “ Dari Abu Hurairah ra, Ia berkata Rasulullah saw, bersabda “ Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya, barang siapa yang menambah atau minta tambahan, itu adalah *Riba*” (HR.Muslim).

c. Macam-Macam Riba

Riba dilihat dari asal transaksinya dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu riba yang berasal dari transaksi hutang piutang dan jual beli.⁷⁴

1) Riba dari Transaksi Hutang Piutang

⁷⁴ Ismail, *Prebankan Syariah* Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.12.

Riba ini disebabkan adanya transaksi hutang piutang antara dua belah pihak. Riba yang berasal dari hutang piutang ini dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Riba Qardh*

Riba *Qardh* adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah disyaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan jumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam akan mengembalikan pinjamannya.⁷⁵

b) *Riba Jahiliyah*



Riba *jahiliyah* merupakan riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Peminjam akan membayar dengan jumlah tertentu yang jumlahnya melebihi jumlah uang yang telah dipinjamnya apabila peminjam tidak mampu membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Kelebihan atas pokok pinjaman ini ditulis dalam perjanjian, sehingga mengikat pada pihak peminjam.⁷⁶

2) Riba dari Transaksi Jual Beli

⁷⁵ *Ibid.*, h.12-13.

⁷⁶ *Ibid.*, h.13.

Riba bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli, riba yang berasal dari transaksi jual beli (tukar menukar) ini dibagi menjadi dua yaitu:⁷⁷

a) Riba *Fadhl*

Riba fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual-belikan dengan ukuran syarak. Maksud ukuran syara' adalah timbangan atau ukuran tertentu. Dengan pengertian lain riba *fadhl*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.⁷⁸ Misalnya, 1 kg beras dijual dengan 1¼ kg. Kelebihan ¼ kg tersebut riba *fadhl*. Jual beli semacam ini hanya berlaku dalam *barter*.⁷⁹

Akhirnya muncul berbagai pendapat tentang jenis riba *fadhl* tersebut di kalangan para ulama fiqh. Menurut ulama mazhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, riba *fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai

⁷⁷ *Ibid.*, h.14.


⁷⁸ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Cet. Ke 10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 28.

⁷⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan Ancaman* Cet. Ke-1, Edisi Ke-2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 30.

harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadh*l.

Sementara itu mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa ilat keharaman riba *fadh*l pada emas dan perak adalah disebabkan karena keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibetuk. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dengan yang lain.⁸⁰

b) Riba *An-Nasi'ah*



Riba *an-nasi'ah* merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dengan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kualitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.⁸¹

Misalnya, pada 01 Agustus 2017, Annisa meminjam beras kepada Anton 100kg pada 01 Agustus 2018, Annisa akan mengembalikan beras sebanyak 110 kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak pertama barang harus

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Ismail, *Prebankan Syariah* Cet. Ke-4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.15.

mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi. Hal ini tergolong transaksi yang dilarang.⁸²

Menetapkan *'ilat* riba *an-nasi'ah* dan riba *fadh*l pada benda benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama mazhab Maliki, *ilat* jenis makanan yang terdapat dalam riba *an-nasi'ah* dengan *ilat* yang terdapat pada riba *fadh*l adalah berbeda. Dalam riba *annasi'ah*, *ilat* pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya bisa dikonsumsi. Apabila satu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka harus satu takaran, seimbang dan adil.

Dengan prinsip ini maka *an-nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, semangka dan lain-lain. Sedangkan riba *fadh*l menurut ulama mazhab Maliki, *'ilatnya* adalah makanan pokok dan tahan lama, sekalipun ulama Mazhab Maliki tidak membatasi waktu dalam hal tahan lama yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi.⁸³

d. Riba Dalam Pertukaran

Berikut ini yang termasuk riba dalam pertukaran, yaitu sebagai berikut:

⁸² *Ibid.*,

⁸³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan Ancaman*, Cet. Ke-1, Edisi Ke- 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 30-31.

- 1) Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan Rp. 9.950,00 uang Rp. 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak termasuk, maka uang Rp. 50,00 adalah riba.
- 2) Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10% dari pokok pinjaman, maka 10% dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
- 3) Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan 2 liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukarkan dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya.
- 4) Seseorang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 5 gram mas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda dengan nilainya (harga) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walaupun harganya sama ukurannya tidak sama.⁸⁴



e. Hikmah Dilarangnya Riba

Berikut di bawah ini beberapa hikmah dilarangnya riba yaitu sebagai berikut:

- 1) Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 64.

- 2) Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena pada dasarnya keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan asil pekerjaan atau jerit payahnya.
- 3) Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
- 4) Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk, orang lain yang memeras keringatnya.
- 5) Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.⁸⁵



B. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi tentang penelitian yang sudah dilakukan. Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran terkait dengan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi.⁸⁶ Berikut adalah beberapa literatur yang digunakan oleh penyusun:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Barter* Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” yang ditulis oleh Umi Fadilah, 2017. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli *barter* motor dengan penambahan uang dimana pembeli akan mencari

⁸⁵ Fatkhul Wahab, Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi, *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. II No. 02: 64, 2017. h. 39.

⁸⁶ Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (01 Desember 2020 Pukul 15:56)

penjual atau penyedia barang yang akan di tukarkan. Jika sudah bertemu mereka langsung melihat kondisi motor yang akan di *barterkan*, setelah itu terjadilah tawar-menawar antara pembeli dan penukar motor dan jika keduanya sudah sepakat maka terjadilah *barter* motor dengan penambahan uang.⁸⁷

2. Kedua, Skripsi yang berjudul “Jual Beli *Barter* Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)” yang ditulis oleh Umi Riyanti, 2016. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli *barter* di desa tersebut yang dilihat dari perspektif ekonomi syariah. Dalam praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli *barter* tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Objek dalam penelitian ini adalah beras dengan sayur.⁸⁸
3. Skripsi yang berjudul “Praktik *Barter* antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit” yang ditulis oleh Agus Salim, 2010. Penelitian ini membahas tentang praktik *barter* antara barang bekas dengan mainan. Transaksi ini merupakan transaksi yang

⁸⁷Umi Fadilah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Barter* Motor Dengan Penambahan Uang, Studi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁸⁸Umi Riyanti, Jual Beli *Barter* Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palangkaraya, 2016.

terlarang karena di dalamnya selain ada unsur penipuan dan juga dikarenakan salah satu pelakunya masih belum dewasa.⁸⁹

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Barter* Daging Sapi Dengan Padi Pembayaran Tempo” Studi Khusus Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, yang mana dalam penelitian tersebut hanya berfokus pada perbedaan jumlah besaran objek *barter* antara daging sapi dengan sebuah padi sebesar 1,5 kwintal. Dimana proses *barter* yang terjadi akan ditinjau menggunakan beberapa teori dalam hukum Islam seperti teori akad dalam Islam, *barter* dalam Islam dan *riba* dalam Islam.



⁸⁹Agus Salim, Praktik *Barter* antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Hadis

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taysiru al allam Syarh Umdatul Ahkam Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi Cet VII, Deriut: Darul Falah, 2008.

Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Darul Fikri, 207-275 M.

Buku

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Cet. Ke 10, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Abidin Zainal, Amarullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

Achmadi Abu, Nabuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-13, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

-----*Metode Penelitian*, Jakarta: BumiAksara, 2011

-----*Metode Penelitian*, Jakarta: BumiAksara, 2005

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamal Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Arikuto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah :suatu pendekatan praktik* Jakarta: BinaAksara, 1985

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Djamil, Fathurrahman *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Harahap, Isnaini, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa, 2003.
- Hasyim, Ali Ibrahim, *Ekonomi Mikro* Cet. Ke-2, Depok: Kencana, 2017.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ismail, *Prebankan Syariah* Cet. Ke-4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ja'Far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan Ancaman* Cet. Ke-1, Edisi Ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peulang dan Ancaman*, Cet. Ke-1, Edisi Ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Mahmudah Siti, *Historisitas Syariah : Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, Yogyakarta: LKiS, 2016
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* Cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mushlich Wardi Achmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, Diterjemahkan Oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, Dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Slamet, Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Sugiyono, *Penelitian Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005

Tika P. Muhammad, *Metedologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet. Ke.41, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Yahya Al faifi, Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Jurnal

Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

Fatkhul Wahab, Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi, *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. II No. 02: 64, 2017.

Sumber Online

Agus Salim, Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2010.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Barter>

<https://kamus.tokopedia.com/j/jatuh-tempo>

Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (01 Desember 2020 Pukul 15:56)

Umi Fadilah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang, Studi di Pekon Negri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Umi Riyanti, Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah, Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palangkaraya, 2016.

Wawancara

Bapak Gufron, Penjual Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 01 Oktober 2020.

Ibu Murni, Penjual Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 6 Oktober 2020.

Ibu Eka, Setiawati, Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 7 Oktober 2020.

Ibu Siti maimunah, Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 01 Oktober 2020.

Ibu Iis setiawati, Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 07 Oktober 2020.

Ibu Imroatus, Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 01 Oktober 2020.

Ibu Puji, Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 02 Oktober 2020.

Bapak Amin, Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 03 Oktober 2020.

Bapak Mardiyo, Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 04 Oktober 2020.

Ibu Maria Cahya Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 07 Oktober 2020.

Bapak Teguh, Pembeli Daging, **Wawancara**, Di Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, 01 Oktober 2020.

Monografi Profil Desa Wargomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu,
2020.

